

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

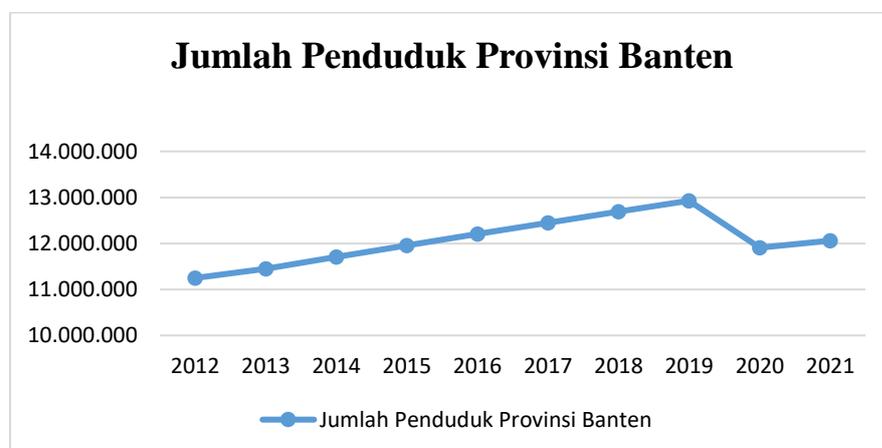
Diidentifikasi bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien merupakan pendorong utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan teori klasik Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang sangat penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Sumber daya manusia sangat penting karena sumber daya alam seperti tanah hanya berharga jika diolah secara efektif oleh individu-individu yang terampil, seperti yang ditekankan oleh Sukirno (Sukirno, 2018a). Oleh karena itu, peran manusia dalam mengelola pembangunan ekonomi bersifat menyeluruh, mencakup fungsi mereka sebagai tenaga kerja, pelaku pembangunan, dan konsumen kemajuan.

Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia selalu menghadapi masalah ketenagakerjaan. Besarnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan angkatan kerja, yang mengakibatkan peningkatan pengangguran dan pencari kerja. Pada akhirnya, ini menyebabkan penurunan tingkat pendapatan. Meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan angkatan kerja, dan meningkatkan pemerataan pendapatan adalah tujuan utama pembangunan. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita yang tinggi dan rendah melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kesuksesan pemerintah dalam pembangunan dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mengurangi

pengangguran, mendorong kesempatan kerja, dan memastikan penyerapan tenaga kerja yang tepat, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan daya beli dan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup, termasuk tingkat pendapatan, tingkat pekerjaan, dan kualitas pendidikan.

Setelah secara resmi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat pada masa pasca reformasi, Provinsi Banten adalah daerah otonom yang relatif baru. Pemisahan ini, yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2000, menandai pergeseran dari sistem terpusat ke sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi sendiri. Semua bagian administratif dan elemen lainnya mengalami keterlambatan dalam pembangunan pada tahun-tahun awal setelah transisi ini. Namun demikian, Banten telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang mencakup bidang ekonomi dan transportasi. Banten telah diuntungkan oleh berbagai faktor yang menguntungkan produksi karena posisinya sebagai jalur laut penting antara Jawa dan Sumatra. Saat ini, provinsi ini sedang mengalami periode bonus demografi hingga tahun 2025, dengan populasi yang terus meningkat dari usia kerja 15 hingga 64 tahun. (Bappeda Banten, 2022).

Gambar 1. 1 Jumlah penduduk di Provinsi Banten Tahun 2012-2021

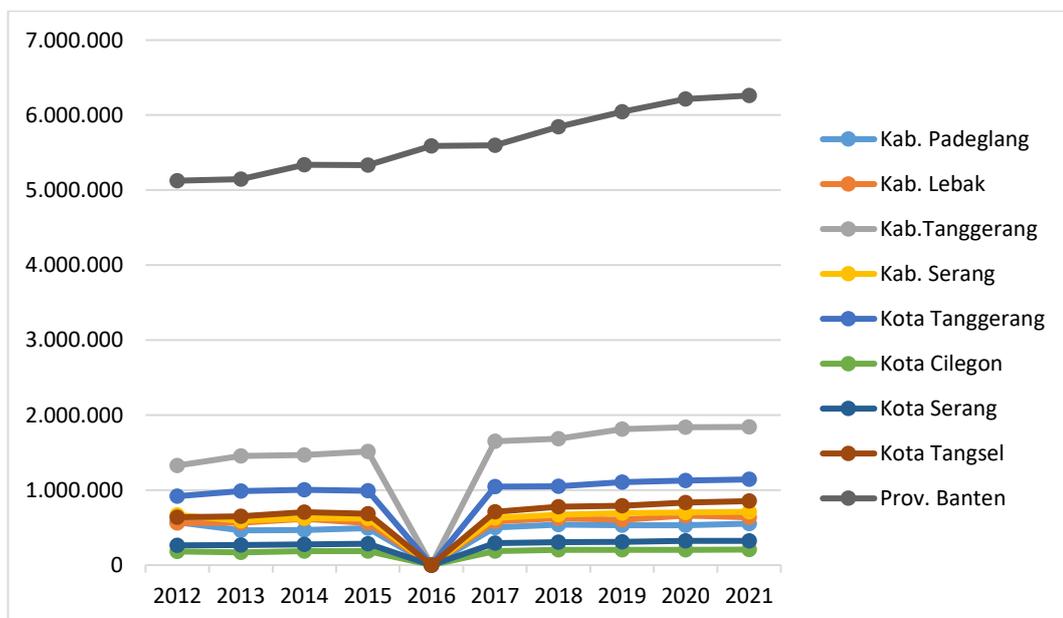


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten (2012-2021)

Berdasarkan Grafik pada Gambar 1.1 yang menggambarkan Jumlah penduduk di Provinsi Banten mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 12.927.316 jiwa. Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk menurun menjadi 11.904.562 jiwa, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah penduduk kembali meningkat dan mencapai 12.061.475 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan tantangan dan hambatan bagi upaya pembangunan, mengingat jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja yang cukup agar angkatan kerja dapat terserap secara efektif ke dalam kegiatan ekonomi.

Berikut kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten periode 2012 – 2021 yang tertera pada gambar tabel dibawah ini:

Gambar 1. 2 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan kerja Provinsi Banten 2012–2021(data diolah).

Dapat terlihat dari Gambar 1.2 gambar grafik diatas memperlihatkan kondisi umum angkatan kerja pada tahun 2012-2021 pada setiap wilayah di Provinsi Banten. Namun pada tahun 2016 tidak di adakan Sampel Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada setiap kabupaten/kota, yang dikarenakan terjadi pemotongan anggaran biaya dari pemerintah. Akan tetapi data Sarkernas pada tahun 2016 hanya terdapat pada tingkat Provinsi saja.

Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, Kota Cilegon memiliki jumlah pekerja terendah. Sebaliknya, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah pekerja tertinggi. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat sejalan dengan populasi yang terus meningkat di Provinsi Banten. Jumlah pekerja meningkat seiring dengan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terus meningkat karena lonjakan permintaan tenaga kerja tidak diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja. Seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Banten, dengan 8,98 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,34%. Tingkat pengangguran yang tidak proporsional ini sebagian besar terdiri dari kaum muda berusia 16 hingga 30 tahun.

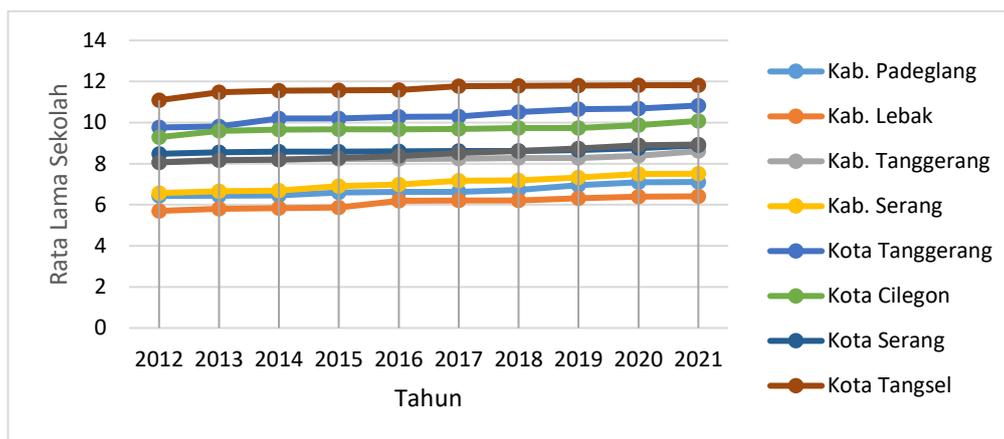
Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu wilayah disebabkan oleh jumlah pekerja yang tidak dapat diserap oleh pasar kerja yang tersedia (Pratiwi, I. M., Marseto, 2021). Karena peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap tidak sebanding dengan lonjaknya angkatan kerja, Provinsi Banten menghadapi masalah ketenagakerjaan. Akibatnya, dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, Provinsi Banten harus segera meningkatkan upayanya untuk memperluas kesempatan kerja.

Skenario masalah ketenagakerjaan sangat rumit, terutama karena kesempatan kerja tidak dapat mengakomodasi seluruh angkatan kerja. Pendidikan sangat penting untuk membangun individu yang kompetitif di dunia kerja, bahkan di era globalisasi saat ini. Peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Sumber daya manusia di bidang pendidikan sangat memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, dengan sumber daya manusia di bidang pendidikan secara umum rendah dan tidak merata, mencerminkan kesenjangan pendidikan yang umum di Indonesia. Namun, lapangan kerja formal membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, yang semakin menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan.

Pentingnya pendidikan sangat penting bagi tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Teori modal manusia Becker menyatakan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan keterampilan manusia. Tingkat pendidikan yang dicapai dapat menentukan kualitas tenaga kerja (Yulistiyono, A., Kurniawati, E., Kustiawan, D., Sari, D. H., Lina Marlina & Rachmawati, 2021). Pendidikan juga penting untuk pembangunan bangsa dan tidak boleh dianggap remeh. Jika sistem pendidikan tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan kualitas manusia di bawah standar, kemajuan negara akan terhambat. Kerugian ekonomi, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan daya saing global disebabkan oleh kekurangan ini. Dengan ekonomi yang terus berkembang, permintaan akan tenaga kerja profesional yang berpendidikan tinggi, seperti manajer, akuntan, teknisi, dan berbagai tenaga kerja terampil lainnya, semakin meningkat. Mereka sangat penting untuk operasi bisnis modern. Biasanya, semakin sulit pekerjaan, semakin lama durasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mendapatkan tenaga ahli yang

diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang penting. Hal ini melibatkan kegiatan yang membimbing siswa, memberi mereka persiapan dasar untuk memasuki dunia kerja (Ganie, 2017). Menilai kualitas pendidikan formal penduduk sering kali diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah, yang menunjukkan tingkat pendidikan yang telah atau sedang ditempuh oleh individu. Angka rata-rata lama sekolah yang lebih besar menandakan pencapaian pendidikan seseorang yang lebih tinggi dan lebih lama (Rika, 2018)

Gambar 1. 3 Data Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2012-2021 (tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2012-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten pada tahun 2012-2021 sedikit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat pendidikan di Provinsi Banten hanya mencapai angka 8,93 yang artinya hanya pendidikan tamatan SMP atau putus sekolah ketika kelas 3 SMP (sekolah menengah pertama). Pada tahun 2012, Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah, yaitu 5,70 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya belum menyelesaikan sekolah dasar. Sebaliknya, Kota

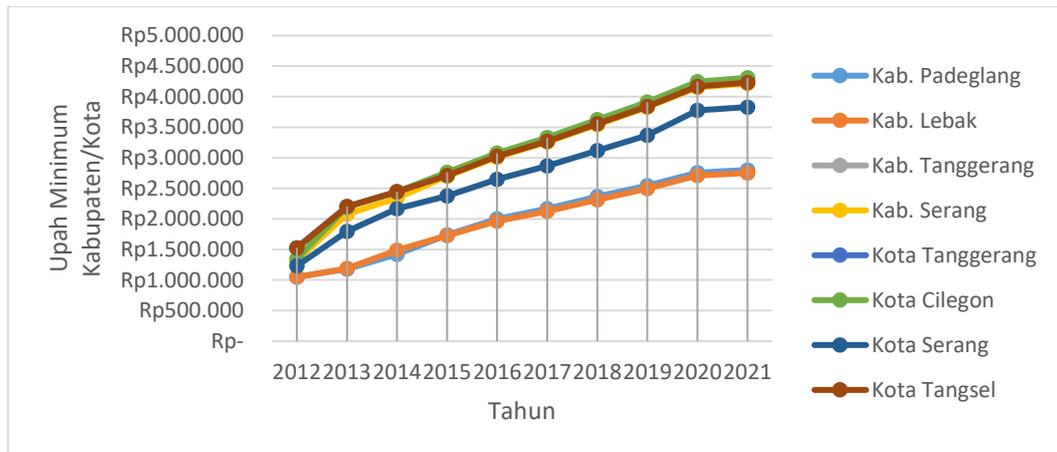
Tangerang Selatan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu 11,48 tahun, yang menekankan bahwa sebagian besar siswa telah menyelesaikan sekolah menengah pertama atau putus sekolah pada tahun kedua sekolah menengah atas. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak akan menjadi paling rendah, yaitu Kota Tangerang Selatan memiliki usia sekolah tertinggi rata-rata 11,82 tahun, setara dengan berhenti sekolah pada tahun ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berkualitas tinggi Provinsi Banten masih di bawah standar.

Meskipun secara geografis Provinsi Banten berdekatan dengan pusat pemerintahan di Pulau Jawa, Provinsi Banten masih jauh dari Program Wajib Belajar 12 tahun yang diprakarsai oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 34 tahun 2003 (Undang-Undang Sisdiknas 2003, n.d.). Di beberapa daerah tertentu di Provinsi Banten, terdapat sejumlah besar individu berpendidikan tinggi yang menganggur. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan kesempatan kerja, tetapi juga karena kurangnya keterampilan, di mana banyak dari mereka yang sangat mengandalkan IPK dan nilai akademis yang tinggi. Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, terbukti bahwa Untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, Provinsi Banten menghadapi tantangan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah pusat di tahun-tahun mendatang, karena pemerintah berusaha untuk menumbuhkan tenaga kerja yang lebih kompetitif yang mampu berkembang di era Society 5.0 saat ini. Era ini ditandai dengan persaingan yang tinggi di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat saat ini dituntut untuk hidup berdampingan dan mahir dalam memanfaatkan teknologi.

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, peningkatan standar pendidikan sangat penting. Pendidikan pada dasarnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui "individu berpendidikan". Produksi meningkat seiring dengan tingkat pendidikan penduduk, yang meningkatkan pendapatan. Akibatnya, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah menerima gaji yang lebih rendah daripada pekerja berpendidikan (Sukirno, 2016b). Selanjutnya penduduk dapat memenuhi kebutuhan 9 hidupnya. Semakin baik kepuasan kebutuhan hidup mengarah pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan upah minimum adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan memperbaiki sistem upah. Penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh upah minimum karena kenaikan upah diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mendorong permintaan yang lebih besar untuk tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil. Akibatnya, kenaikan upah dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas perusahaan, serta mendorong peningkatan tenaga kerja (Iksan, S. A., Arifin, Z., & WahyudiSuliswanto, 2020). Berikut adalah data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2012 – 2021 :

Gambar 1. 4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2012-2021

Dari tabel 1.2 upah minimum di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2021 Dari tabel di atas, rata-rata mengalami peningkatan secara signifikan. Upah minimum tertinggi berada ditahun 2021 yaitu sebesar Rp4,309,773 di Kota Cilegon, sedangkan upah minimum terendah ditahun 2012 sebesar Rp 1,047,800 berada Kabupaten Lebak. Upah minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, dampak penerapan kebijakan upah minimum mengharuskan perusahaan untuk mengikuti tingkat upah yang ditetapkan pemerintah yang terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana diuraikan oleh Buchari (Buchari, 2016) Akibatnya, bisnis mungkin harus mengurangi jumlah karyawan mereka atau mengurangi permintaan tenaga kerja. Karena tingkat upah yang tinggi yang ditawarkan, para pencari kerja, sebaliknya, mungkin sangat tertarik untuk mendapatkan pekerjaan. Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, adalah dasar penentuan upah. Hasil tambahan adalah peningkatan tingkat pengangguran, yang disebabkan oleh kebutuhan perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan mereka (Rini Susilawati,2012)

Jika upah meningkat sementara biaya input lain tetap stabil, permintaan tenaga kerja dapat menurun. Kondisi ini mendorong bisnis untuk mempertahankan keuntungan maksimum dengan mengurangi atau mengganti tenaga kerja dengan input yang lebih hemat biaya (Kuncoro 2001 dalam (Fadillah, 2022)). Namun, ini bukanlah aturan yang berlaku untuk semua orang, karena peningkatan upah minimum juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan upah memengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan permintaan. Dengan demikian, lebih banyak perusahaan masuk ke pasar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Satu ukuran penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi.. Menilai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam beberapa periode dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencakup nilai tambah dari berbagai industri dalam suatu periode waktu tertentu, menjadi indikator krusial untuk menilai tingkat penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB menandakan adanya peningkatan nilai tambah output atau peningkatan penjualan di seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut (Ganie, 2017). Menurut (Feriyanto, 2014), ketika perusahaan mengalami pertumbuhan output dan penjualan, permintaan tenaga kerja cenderung meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2012-2021 menunjukkan adanya fluktuasi nilai PDRB di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah selama periode ini, sementara Kota Tangerang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari tahun 2012-2021 dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung atas dasar harga konstan yang dicapai pada tahun tertentu, dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyajian PDRB dalam urutan, yang membandingkan berbagai wilayah, memberikan gambaran yang luas tentang kinerja pembangunan ekonomi makro dari waktu ke waktu. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang jalan ekonomi di wilayah tersebut. Terbukti bahwa informasi ini bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai tujuan, seperti perencanaan, evaluasi, dan studi akademik (Fadillah, 2022).

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun pertumbuhan tersebut tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga perlu diterapkan kebijakan peningkatan pendidikan, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Angka pengangguran meningkat karena jumlah angkatan kerja yang meningkat tidak diimbangi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga secara umum dapat diasumsikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten belum optimal. Oleh karena itu, masalah pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi masalah besar di semua negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kedua masalah tersebut membentuk satu kesatuan, yang keduanya menciptakan dualitas masalah yang saling bertentangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten/Kota Provinsi Banten?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui apakah PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh pendidikan (Rata Lama Sekolah), upah minimum Kabupaten/Kota dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi banten

tahun 2012-2021, adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui badan pusat statistik provinsi banten, dan sumber kepustakaan yang lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat untuk menambah informasi dalam mengungkapkan permasalahan pengaruh tingkat pendidikan upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Sehingga hasil penelitian ini berguna antara lain bagi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peningkatan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan upah minimum, PDRB, dan pendidikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
- b. Penelitian tentang bagaimana pendidikan, upah minimum di tingkat kabupaten, dan PDRB berdampak pada penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota di Provinsi Banten harus dipertimbangkan sebagai bahan penelitian yang berguna.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan, upah minimum kabupaten, dan PDRB yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Banten. Informasi ini bermanfaat bagi proses perumusan kebijakan, yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Dengan memperhatikan masalah ketenagakerjaan, pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik untuk kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

- b. Bagi Peneliti Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten, dan PDRB provinsi banten dan permasalahannya.